



# DPRD Desak Tertibkan Kendaraan Pelat Luar

## ■ Apresiasi Raih Opini WTP

PONTIANAK, TRIBUN - Seluruh fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan menerima laporan pertanggungjawaban atas APBD tahun anggaran 2012. Sembilan fraksi menerima Raperda APBD 2012 untuk ditetapkan jadi Perda dalam rapat paripurna di DPRD Kalbar, Selasa (27/8).

Seluruh fraksi memberikan apresiasi atas capai opini WTP dari BPK RI atas laporan keuangan APBD tahun 2012. Namun, sejumlah fraksi memberikan catatan kepada Gubernur Kalbar Comelis untuk memerintahkan pelaksanaan pemerintahan.

Fraksi PPP melalui Miftah meminta Pemprov mempertanyakan nilai WTP pada tahun mendatang. Meskipun capai WTP tersebut sebagai penilaian yang sifatnya administratif belaka.

"Kita berharap hendaknya lebih kepada semakin kecilnya tingkat kemiskinan, tingginya angka indeks pembangunan manusia. Majunya pembangunan di Kalbar, bukan kepada penilai tersebut saja," katanya.

Selain itu, fraksi PPP menyentil Dinas Pendapatan Daerah Kalbar yang memajang

77 Keberadaan alat berat dan pelat luar perlu ditindak lanjuti karena berdampak pada kerusakan jalan. 77

### MIFTAH

Jubir Fraksi PPP

"Adanya capain atas WTP hendaknya dana tersebut ke depan dipergunakan untuk dana insentif daerah," harapnya.

Sekda Kalbar M Zeet Hamdy Assovie menyatakan bahwa APBD Kalbar dipergunakan dengan prinsip keadilan adalah keseimbangan distribusi berdasarkan keuangan diutamakan untuk masyarakat.

Ditambahkannya, raih WDP dalam tiga tahun terakhir dan keberhasilan raih WTP sesuai penilai BPK.

"WTP tidak ada intervensi pihak manapun. Ke depan, tingkatan kinerja dan nota kesepahaman. Persoalan sertifikat tanah telah dilaksanakan kesepakatan bersama antara Pemprov dan Kanwil BPN," tukasnya. (rhd)

## Tunggu Reward

**SEKRETARIS** Daerah Kalbar M Zeet Hamdy Assovie mengungkapkan, sisa lebih anggaran pada APBD tahun 2012 telah habis. APBD Kalbar tahun anggaran 2012 terdapat sisa lebih anggaran senilai kurang lebih Rp 220 miliar.

"Ada pemakaian 2013 Rp 150 miliar dan sisanya dibagi ke kabupaten/kota untuk penambahannya bagi hasil pajak. Uang tersebut habis," ujar M Zeet kepada *Tribun*, Selasa (27/8).

Pemrov Kalbar pada tahun anggaran 2012 mendapatkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI wilayah Kalbar. Atas capaian tersebut pemerintah Kalbar akan mendapatkan reward.

"Berharap besar ya. Karena keputusan pe-

merintah dan kita berharap pemerintah pusat memberikan tiga kali lipat dari kota. Uang yang kita dapat itu tidak semuanya kita pakai, tapi bagikan ke kabupaten/kota," jelasnya.

M Zeet mengungkapkan, kepastian pemberian reward baru akan diketahui pada akhir November, mendatang. Selanjutnya, alokasi anggaran tersebut akan masuk ke APBD 2014 mendatang.

"Untuk APBD Perubahan ini adalah format pergeseran dari kegiatan, karena belum tuntas dan APBD Perubahan tidak bisa seperti yang murni, dan dari tidak penting menjadi penting, dan kita belum hitung jumlahnya, mudah-mudahan kita dapat angka-angka tersebut," tukasnya. (rhd)